



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP) DINAS PANGAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performanca Indicator) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021, Tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melaksanakan Tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah Daerah di Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

Kedudukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Kedudukan

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Organisasi

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melaksanakan Tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah Daerah di Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

Tugas pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kota Bandar Lampung mengacu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Dinas Pangan Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- c. **Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan :**
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- d. **Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan:** Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e. **Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal :**
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

- f. **Bidang Keamanan pangan** : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
- g. Unit pelaksana Teknis
- h. kelompok jabatan Fungsional

Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
-
- a. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - b. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, mempunyai sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - c. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

- d. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Rencana Strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Penyusunan LAKIP Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023, dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu bersumber dari Dana APBD Tahun 2023.

1.3 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,

transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Sehubungan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Kota Bandar Lampung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 41 orang yang terdiri dari 27 orang berstatus PNS, 10 orang Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak. Jumlah SDM Dinas Pangan Kota Bandar Lampung secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Sumber: Laporan Mutasi Barang per. 31 Desember 2023 (Semester IV) pada Dinas

N o.	Eselon/Non	Pendidikan							Golongan				Non PNS	Σ
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLT P	S D	IV	III	II	I		
1	Eselon II		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2	Eselon III	5		-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
3	Eselon IV	1		-	-	-	-	-	1		-	-	-	1
Sub Jumlah		6		-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
4	Non Eselon	4	11	-	-		-	-	4	11	-	-	-	14
5	Fungsional	4	3	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	7
8	Tenaga Kontrak	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10	10
Sub Jumlah		8		-	-	4	-	-	7	15	-	-	10	37
Jumlah		14	23		-	4	-	-	13	15	-	-	10	37

Pangan3: Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023 (data diolah)

1.4 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Pangan Kota Bandar Lampung berada di Gedung Pelayanan Satu Atap JL. Dr. Susilo Nomor 2 , lantai 10, Bandar Lampung, Bandar Lampung

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Mutasi barang

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pendukung pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung

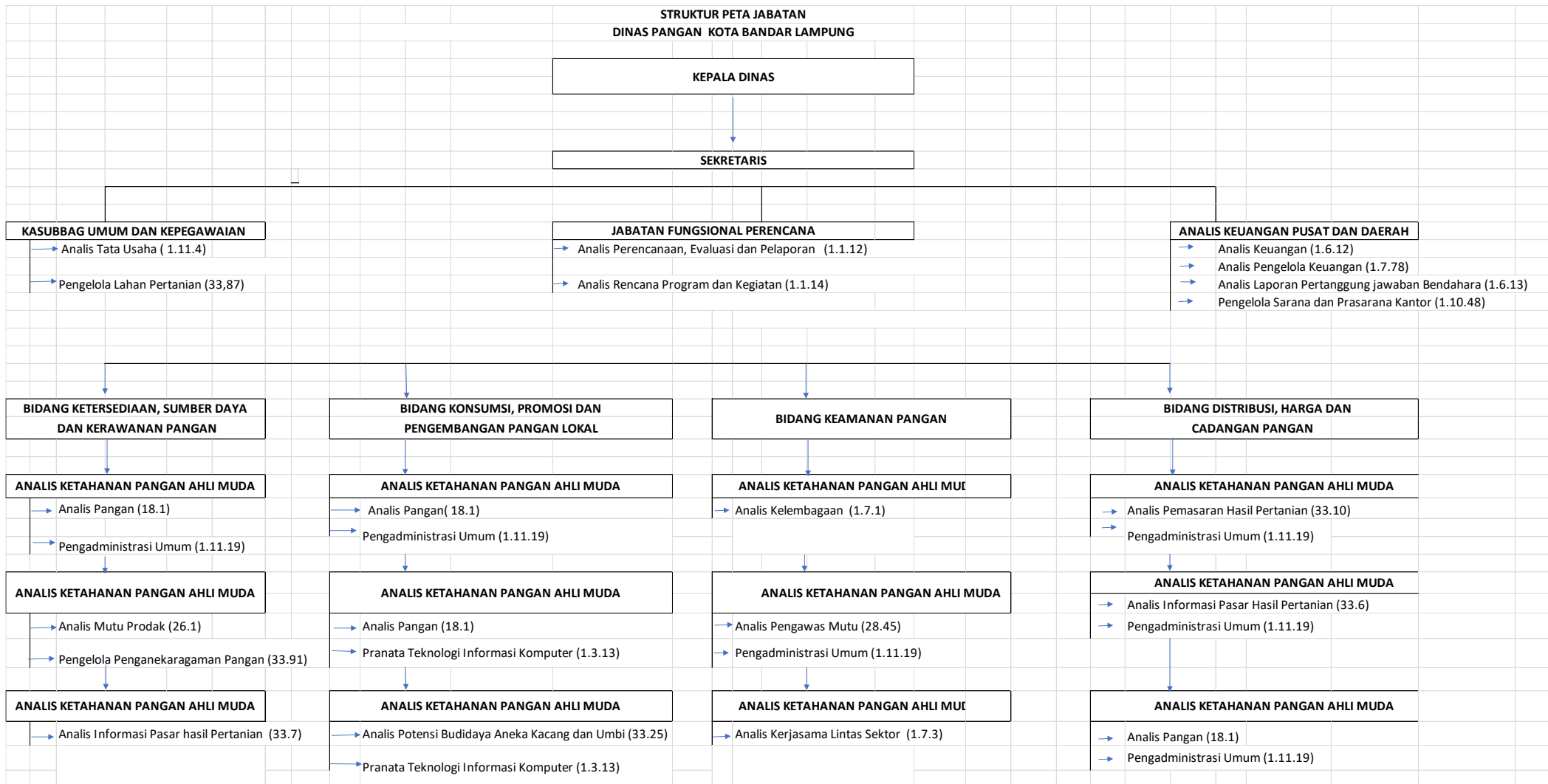
No.	Nama Barang	Type/Jenis	Ukuran/ Luas	Jumlah	Kondisi
1.	GudangPangan dan Lantai Jemur	Gudang Lantai jemur	8x10 m ² 3x6 m ²	1 Unit 1 Unit	Rusak Baik
2.	Kendaraan Roda 4 Roda 2	Toyota Inova Sepeda Motor	2000 CC 100 CC	1 Unit 16 Unit	Baik Baik
3.	Peralatan Kantor Mesin Tik Komputer Printer LCD UPS Wireless Kamera OHP AC Mesin Penghancur kertas Brankas Whiteboard Lemari Arsip Filling Kabinet Kursi Meja			6 Unit 66 Unit 10 Unit 1 Unit 11 Unit 3 Buah 3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 11 Unit 8 Unit 198 Unit 75 Unit	1 Baik dan 5 rusak 20Baik 46 Rusak Baik , Baik rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Laporan Mutasi Barang per. 31 Desember 2023 (Semester IV) pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2023 (data diolah)

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar **Rp 5.973.419.763,-** (setelah perubahan) termasuk gaji dan tunjangan ASN. Adapun nama Program dan Kegiatan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada APBD Kota Bandar Lampung T.A. 2023 dapat dilihat pada Laporan Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Bab III.

Struktur Organisasi Dinas Pangan



II. PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melaksanakan tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kota Bandar Lampung, yang akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kinerja pada Akhir Tahun Rencana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan		Tanpa (Zero) kelaparan di kotabandar Lampung (no hungry)	92							100%
		1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	Hasil penilaian kuantitatif kinerja OPD oleh Inspektora Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	74.8	74.94	75	75.1	75,2	75,31	75,41	75,41

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kinerja pada Akhir Tahun Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi dan Seimbang	SKOR PPH	85.5	86	86.2	86.50	86,75	87	87	87
		3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	persentase jumlah sampel pangan segar yang diujikan mandal amkurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diujikan dalam kurun waktu 1 tahun	85	85.5	86	87	87.5	88	88	88

2.1.2 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan	1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	Meningkatkan pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pangan	1. Optimalisasi system perencanaan, pelaporan dan evaluasi penganggaran dan kinerja OPD
	2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam,	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan peran pemerintah dan kelembagaan lokal dalam pengane karagaman pangan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Bergizi dan Seimbang		gizi berbasis sumber daya lokal
			2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
			3. Pengembangan sistem informasi pasokan, harga dan akses pangan
			4. Pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai AKG
		Meningkatkan Penanganan daerah rawan pangan	1. Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis
			2. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			3. Percepatan Penyusunan Petakan dan Kerentanan Pangan
	3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	1. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terutama PSAT (pangan segar asal tumbuhan)
			2. Penyediaan sarana prasarana pengujian
			4. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal Tumbuhan (PSAT)

2.1.3. Program

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mengacu pada program pembangunan tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 terdapat 4 Program yang terbagi dalam kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semestaeran SKPD
1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.3.1	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.6	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.1.2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.1.3	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya

2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota
2.2.1	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
3.1.1.	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,
3.2	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek yang mencakup tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pangan adalah seperti dijelaskan dalam table berikut (Tabel 5)

Tabel 5. Tabel Rencana kinerja yang direncanakan pada Tahun 2023

N O	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI	
		URUSAN	BIDANG JURISDIKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
1	2	3					4	5	6	9	
								Tolak Ukur		K	Rp
								Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar lampung (no hungry)	%		
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	nilai	98	5.973.419.763
		2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98	4.481.608.251
		2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	60.000.000
		2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen		60.000.000
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	
		2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	100	3.579.588.363
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali		
								jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31	3.466.068.363,00

1	2	3					4	5	6	9	
		2	0 9	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen		98.520.000
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40	
		2	0 9	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan		15.000.000
		2	0 9	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	20%	67.840.000
		2	0 9	0 1	2.0 5	0 3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		15.000.000
		2	0 9	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	52.840.000
		2	0 9	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98	142.957.150
		2	0 9	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000
		2	0 9	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	25.000.000
		2	0 9	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	15.000.000
		2	0 9	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket		
								jumlah paket barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1	22.332.150
		2	0 9	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok		2.500.000

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	1		
		2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen		
							Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	13.125.000	
		2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	60.000.000	
		2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	100	134.387.905
		2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			59.387.905
		2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	10	75.000.000
		2	09	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD	%	98	348.000.000
		2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket		
							jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		12.000.000	
		2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan		
							jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1	336.000.000	

		2	0 9	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	%	98	148.834.833
		2	0 9	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit		33.465.705
								jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1	
		2	0 9	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit		115.369.128
								jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16	
	Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk Memenuhi kecukupan Energi perkapita							Skor PPH	skor		
		2	0 9	0 3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.128.488.450,0
								Ketersediaan Pangan Utama	%	102	
								Ketersediaan energi per kapita	kkal/Kap/h ari	2510	
								Ketersediaan protein per kapita	gram/kapit a/hari	72,16	
								pencapaian skor PPH		86,50	

							Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%			327.137.050
		2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen			48.532.050
								Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	1		
		2	09	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen			133.957.000
								Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1		
		2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen			144.648.000
								Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	1		
		2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%			500.000.000
		3	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton			500.000.000
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	44		
		2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)	skor	86		301.351.400

		2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen			60.000.000
								Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen		1	
		2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksana kegiatan pameran				
								Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung				241.351.400
								terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan				
								jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan		1	
		2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	%		6	162.622.500
		2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan	dokumen		1	54.022.500
		2	09	04	2,01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen			
								Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen		1	54.022.500
		2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota	persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani	%		100	108.600.000
		2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan			108.600.000

		2	0 9	0 5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	87	200.700.562
		2	0 9	0 5	2,0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	%	87	200.700.562
		2	0 9	0 5	2,0 1	0 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan terregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)		100.175.000
								KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	1	
		2	0 9	0 5	2,0 1	0 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar		100.525.562
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian target dan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran yang dilaksanakan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.

Dinas Pangan melaksanakan empat program pada Tahun Anggaran 2023 diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal, Bidang Keamanan Pangan serta Sekretariat Dinas Pangan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pangan tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan realisasi fisik dan keuangan dan Laporan Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran untuk Kabupaten/Kota kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Bandar Lampung.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja utama Bidang Pangan. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pangan yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		(TAHUN 2020)	TAHUN 2021	REALISASI	TAHUN 2022	REALISASI	TAHUN 2023	REALISASI	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET KINERJA	
			TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IKU													
Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Skor	74.8 (BB)	75,01-77,00	70,31	77,01-78,00	76,5	78,01-79,00	BELIM DINILAI	79,01-80,00	80,01-81,00	80,01-81,00	80,01-81,00	
Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	85.5	86	85,4	86,2	88,2	86,5	93,2	86,75	86,75	87	87	
Persentase jumlah sampel pangan segar yang diuji dan aman dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diuji dalam kurun waktu 1 tahun	persen	85	85.5	85,5	86	85,5	87	87	87.5%	87.5	88	88	
IKK													
Ketersediaan Pangan Utama	%	92.	95	100	98.	102	100	129	102	105	110	110	
Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2490	2500	3118	2510	3025	2520	3096	2530	2540.00	2550.00	2550.00	
Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/hari)	72.10	72.14	68,19	72.16	68,32	72.18	68,95	72.20	72.22	72.25	72.25	
Penguatan Cadangan Pangan	%	24.08	24.08	0	30.00	40	40.00	20	50.00	50.00	60.00	60.00	
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85.5	86	88,2	86,2	86,5	86,5	93,2	86,75	86,75	87	87	
Persentase daerah rawan pangan	%	8.7rawan pangan (11 kel /126 kel)	8.00	6	7.00	3	6.00	5	5.00	5.00	5.00	5.00	
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85	85.5	85,5	86	86,5	87	87	87.5	87.5	88	88	

Table 8 menggambarkan Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pangan. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pangan yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.di bawah ini rincian analisis tiap indikator

Dinas Pangan melaksanakan empat program pada Tahun Anggaran 2023, adapaun tingkat capaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dijabrkan dalam tabel 8.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada Pengukuran Kinerja IKU Sasaran Tahun 2023 (Tabel 8), terdapat 3 sasaran yaitu :

1. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung

Hasil ini dioperoleh dari skor penilaian akuntabilitas kinerja dinas pangan yang mecakup penilain beberapa komponen yaitu

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi

Berdasarkan skor tahun 2022 hasil evaluasi masuk kategori “Sangat Baik” yaitu dengan nilai 76,1(BB), skor tahun 2021 sebesar 70.31 “Sangat Baik” sedangkan tahun 2023 masih dalam tahap evaluasi oleh inspektorat Kota bandar lampung

2. Skor pola pangan harapan (PPH)

PPH merupakan instrument sederhana untuk mengukur situasi konsumsi pangan penduduk, semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan masyarakat tersebut semakin beragam, bergizi dan seimbang. Skor PPH Tahun Anggaran 2023 (menggunakan data proyeksi tahun N-1) yaitu sebesar 93,2 melebihi target yaitu 86,5. Skor tahun 2023 jauh lebih tinggi dikarenakan menggunakan data sekunder. Berbeda dari data tahun 2021 dan 2022 yang cenderung lebih rendah menggunakan data primer / sampel secara langsung pada kelompok masyarakat.

Skor PPH kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar 85,4. Sedangkan tahun 2021 Skor PPH 88,20. Dengan besarnya nilai PPH berarti pemahaman masyarakat bandar Lampung akan pangan beragam, bergizi dan seimbang semakin baik.

- 3. Persentase jumlah sampel pangan segar yang diuji dan aman dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diuji dalam kurun waktu 1 tahun** Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu pengujian keamanan pangan pada beberapa sampel pangan segar di beberapa titik pasar tradisional dan pasar modern. Capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah 87 % sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan melalui acara sosialisasi kepada penyuluh pertanian dan juga pelaku usaha, dimana target pelaksanaan tercapai 100%.

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Ketersediaan Pangan Utama

Pengertian Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk

menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Persentase **ketersediaan pangan utama** (beras) Formulasi perhitungan : (Jumlah **ketersediaan pangan** (beras) dibagi jumlah kebutuhan konsumsi selama satu tahun) dikali 100% . Tingkat ketersediaan pangan kota bandar lampung dapat dikatakan tercukupi ketersediaannya, karena kota bandar lampung merupakan terminal hasil pertanian dari kabupaten di sekitarnya seperti kota Metro, Kabupaten lampung tengah dan kabupaten Pringsewu yang merupakan pemasok beras utama. tingkat capaian ketersediaan pangan tahun 2023 yaitu 129% (Surplus)

2. Ketersediaan Energi per kapita

Tingkat ketersediaan energi per kapita Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Adapun sumber ketersediaan energy dapat berupa, beras, jagung, ketela,.ubi, talas dan lain lain. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) Pengelolaan cadangan pangan.

Rekomendasi Kemenkes yaitu 2.400 kalori perkapita per hari untuk konsumsi energi. Pada tahun 2023 ketersediaan energi perkapita sebesar 3.096 kalori/kap/hari, ketersediaan energi perkapita sebesar 3.096 Nilai ini didapat dari perhitungan neraca bahan makanan hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi kota Bandar Lampung surplus.

3. Ketersediaan protein per kapita

Tingkat ketersediaan protein per kapita berfungsi menjamin pasokan protein untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sumber protein berasal dari daging, dagingan, ikan, kacang kacangan, telur, susu dll. Hasil penyusunan NBM Kota Bandar Lampung diperoleh angka ketersediaan protein tahun tahun 2023 diperoleh angka ketersediaan protein sebesar 68,95 gram/kap/hari

4. Persentase Daerah Rawan Pangan

Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis. **Kerawanan Pangan Transien** adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). **Kerawanan Pangan Kronis** adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan

Penanganan rawan pangan dapat dilakukan pertama melalui deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan pada suatu wilayah, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dengan SKPG dapat dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kerawanan pangan transien suatu wilayah.

Kedua, melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang telah mengalami kerawanan pangan kronis melalui program-program rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan pangan transien melalui bantuan social.

Tahun 2023 dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melalui pemberian bantuan pangan (susu, telur, kacang hijau) kepada 360 kk di daerah lokus rentan rawan pangan yaitu kel, way gubak (kec Sukabumi), kel. Kedaung (kec Kemiling), kel keteguhan (kec teluk Betung Timur), dan kel srengsem (kec. Panjang)

5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan bahwa target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah 85%. Di Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2023.

Program Pengawasan keamanan pangan pada tahun anggaran 2023 diperkuta dengan terealisasinya 2 sub kegiatan yaitu (1)Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota melalui dana APBN (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Penguatan kelembagaan keamanan pangan difokuskan memperkuat kelembagaan untuk pelayanan registrasi PSAT yang baru dirintis pada tahun 2023

1.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp. Rp 5.973.419.763 dan terealisasi sebesar Rp 4.300.749.096,-(72%) Uraian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupetn/Kota sebesar Rp. Rp4.481.608.251,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. Rp3.561.586.114,00 atau 92%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan dengan capaian indikator sebesar 98%

beberapa penyebab serapan kurang diantaranya karena tunjangan kinerja pegawai dan honor tenaga yang tidak tercapai 100 %)

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.34.386.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.530.400,00 atau 85.88%.% yang memiliki target capaian kinerja 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen (100%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp 60.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 47.482.200,00 atau 92.67% yang memiliki target capaian kinerja 30 orang/bulan dan terealisasi 30 orang /bulan (100%).

2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan sebesar Rp 98.520.000 ,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 77.340.000,-atau 78,5 % yang memiliki target capaian 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semestersn SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semestersn SKPD sebesar Rp 15.000.000 ,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 15.000.000,-atau 100 % yang memiliki target capaian 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 15.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
2. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 52.840.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (0 %).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 2 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 25.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.895.500,00 atau 99.58% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 3 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor sebesar Rp. 15.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.460.000,00 atau 96.40% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 4 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 22.332.150,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.241.800,00 atau 99.60% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 5 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.500.000,00 atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 6 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 13.125.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

11.000.000,- atau 83.81%, dan memiliki target capaian 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

- 7 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi Rp. 29.975.000,00 atau 49.96% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengadaan Mebel sebesar Rp. 59.387.905,00 dan terealisasi Rp. 59.241.000,00 atau 99.75% yang memiliki target capaian kinerja 53 Unit dan terealisasi 53 unit (100%).
- 2 Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi Rp. 74.840.000,00 atau 99.79% yang memiliki target capaian kinerja 8 unit dan terealisasi 8 Unit (100%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 12.000.000,00 dan terealisasi Rp. 11.960.000,00 atau 99.67% yang memiliki target capaian kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan(100%).
2. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 336.000.000,00, terealisasi Rp. 312.000.000,- atau sebesar 92.86% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.33.465.705 dan terealisasi Rp. 28.882.600 atau 86.31% yang memiliki target kinerja 1 unit dan terealisasi 1 unit

2. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sebesar Rp.115.369.128,00 dan terealisasi Rp.104.377.000,- atau 90.47% yang memiliki target kinerja 16 unit dan terealisasi 16 unit

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan sebesar Rp. Rp. 48.532.050,00 terealisasi Rp.29.366.100,-atau 60.51% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan
2. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sebesar Rp. 133.957.000,00 terealisasi Rp. 90.409.000,-atau sebesar 67.49%, memiliki target kinerja 1 laporan dan belum terealisasi karena kendala pendanaan
3. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp. 144.648.000,00 terealisasi Rp.46.960.500,- atau sebesar 32.47% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

b. Pengelolaan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi Rp.166.570.000,00 yang memiliki target kinerja 44 atau sebesar 33,31 % yang memiliki target kinerja 44 ton dan terealisasi 20 ton penambahan cadangan pangan

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasi keuangan Rp.57.908.950,00 atau sebesar 96,51 %, yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
2. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebesar 230.000.000,- termasuk pembayaran hutang tahun lalu sebesar Rp. 11.351.400,- sehingga pagu setelah APBDP menjadi Rp241.351.400 realisasi keuangan Rp.112.873.250,-atau sebesar 46,77% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebesar Rp. 54.022.500,00 realisasi keuangan Rp.47.030.900,00 atau sebesar 87,06 % yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

a. Kegiatan penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota sebesar Rp.108.600.000,00 realisasi keuangan Rp. 83.135.282,00 atau 76,55 % telah, yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

a. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100.175.000,00, realisasi keuangan Rp. 45.176.700,00 atau sebesar 45,10 %,realisasi kegiatan 100% yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100.525.562,00, realisasi Rp.48.380.900,00,- atau sebesar 48,13 %,realisasi kegiatan 100% yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023) sd TRIWULAN IV	
				5	6	K	Rp
1	2	3	4	5		6	
		Tolak Ukur		K	Rp	K	Rp
		Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar lampung (no hungry)	%				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	nilai	98	5.973.419.763	98,0	4.300.749.096
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98	4.481.608.251	100	3.561.586.114
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	60.000.000	100	47.482.200

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen		60.000.000		47.482.200
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6		6	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	100	3.579.588.363	95	2.797.731.014
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali		3.466.068.363,00	14	2.705.391.014
	jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31		29	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen		98.520.000	11	77.340.000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40		40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan		15.000.000	1	15.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	20%	67.840.000	20	15.000.000
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		15.000.000	1	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	52.840.000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98	142.957.150	98	110.072.300

Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000	1	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	25.000.000	1	24.895.500
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	15.000.000	1	14.460.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket		22.332.150	1	22.241.800
	jumlah paket barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1		1	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok		2.500.000		2.500.000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	1		1	
Fasilitas Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen		13.125.000		11.000.000
	Jumlah laporan fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	1		1	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan		60.000.000		29.975.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1		2	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	100	134.387.905	100	134.081.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			59.387.905	53	59.241.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	10	75.000.000	8	74.840.000

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD	%	98	348.000.000	75	323.960.000
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket		12.000.000		11.960.000
	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan			1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan		336.000.000		312.000.000
	jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1		1	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	%	98	148.834.833	98	133.259.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit		33.465.705		28.882.600
	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1		1	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit		115.369.128		104.377.000
		jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16		16	
Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk Memenuhi kecukupan Energi perkapita		Skor PPH	skor				
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.128.488.450,0	30	515.439.200
		Ketersediaan Pangan Utama	%	102		129	
		Ketersediaan energi per kapita	kkal/Kap/hari	2520		3.096	
		Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	72,18		68,95	
		pencapaian skor PPH		86,00		93,20	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	102,00	327.137.050	129	166.735.600

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen				
	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	1	48.532.050	1	29.366.100
Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen				
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1	133.957.000	1	90.409.000
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen				
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	1	144.648.000	1	46.960.500
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%		500.000.000	44	166.570.000
Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton		500.000.000		166.570.000

	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	44		44	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)	skor	86	301.351.400	93,20	182.133.600
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen		60.000.000		57.908.950
	Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	1		1	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran					
	Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung			241.351.400		124.224.650
	terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan					
	jumlah pemberdayan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan	1		1	

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	6	162.622.500	5	130.166.182
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan	dokumen	1	54.022.500	1	47.030.900
Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen		54.022.500		47.030.900
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	1		1	
Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota	persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani	%	100	108.600.000	98	83.135.282
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan		108.600.000		83.135.282

	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	87	200.700.562	87,0	93.557.600
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	%	87	200.700.562	87,00	93.557.600
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)		100.175.000		45.176.700
		KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	1		1	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	100.525.562	1	48.380.900

	PEMBAYARAN HUTANG				59.351.400		59.351.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				48.000.000		48.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				11.351.400		11.351.400
				Jumlah Total Anggaran Seluruh Program	5.973.419.763		4.300.749.096

IV. PENUTUP

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada Dinas Pangan di Tahun Anggaran 2023 pencapaian kinerja Dinas Pangan sangat baik dengan realisasi anggaran maupun kinerja 72 %

Berkaitan dengan belum tercapainya beberapa indikator kinerja pada Dinas Pangan maka upaya perbaikan akan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta Sumber Daya Manusia yang ada.

Hasil capaian kinerja tersebut seharusnya dapat segera diperbaiki untuk senantiasa berusaha berkinerja lebih baik sehingga diharapkan sasaran pada Renstra Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 dapat terwujud dengan baik, demikian juga sasaran-sasaran stratejik berikutnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2023

**Plt KEPALA DINAS PANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Mohammad Yusuf, S.E.,M.Si.
Pembina Tk 1
NIP. 19680411 199603 1 002**